

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan hasil analisis parsial, terlihat bahwa variabel jumlah angkatan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019. Dalam uji koefisien regresi menunjukkan nilai negatif yang menandakan adanya hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan variabel jumlah angkatan kerja. Kenaikan jumlah angkatan kerja akan berpengaruh menurunkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dalam jurnal Yunani, dkk yang berjudul Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 , dimana variabel angkatan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2014. Maka, dapat dipahami bahwa ketika jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah juga akan meningkat. Hal ini terjadi akibat penambahan usia kerja baru dan pergeseran dari bukan angkatan kerja ke angkatan kerja yang menyebabkan kesempatan kerja

meningkat, tetapi tidak diikuti dengan pembuatan lapangan kerja baru<sup>166</sup>.

Penelitian lain juga menghasilkan serupa yaitu penelitian dalam jurnal yang dilakukan oleh Yunita Bella David , dkk yang mana secara parsial variabel angkatan kerja bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara yang berarti semakin banyak angkatan kerja maka makin banyak pula tingkat penganggurannya<sup>167</sup>.

Berbeda dengan dua jurnal penelitian sebelumnya, jurnal penelitian yang dilakukan Moch Heru Anggoro mendukung hasil penelitian ini. Dalam kesimpulan jurnal tersebut, variabel pertumbuhan angkatan kerja menunjukkan pengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran Kota Surabaya tahun 2004 – 2013. Hal tersebut dikarenakan Kota Surabaya sektor perdagangan, hotel, restoran, keuangan, persewaan dan jasa menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yang ada<sup>168</sup>.

Ketidaksignifikan pengaruh jumlah angkatan kerja kemungkinan terjadi karena angkatan kerja tersebut diantaranya sudah melakukan pekerjaan, sehingga sudah tidak dikategorikan sebagai pengangguran terbuka. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan upaya untuk menekan tingkat pengangguran seperti mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan *skill* , transmigrasi dan upaya-upaya lainnya. Sementara itu

---

<sup>166</sup> Yunani Tiya Kasanah , Anifatul Hanim, Edi Suswandi, *Faktor-faktor Mempengaruhi Pengangguran Terbuka* .....hal.21-25

<sup>167</sup>Yunita Bella David, Daisy S.M Engka, Jacline I.Sumual, *Pengaruh Angkatan Kerja Bekerja Dan Jumlah Penduduk*..... hal.3389-3398

<sup>168</sup>Moch Heru Anggoro dan Yoyok Soesatyo, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja*.....hal.1-13

untuk pengaruhnya ke arah negatif , ketika jumlah angkatan kerja meningkat, tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019 akan menurun disebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja diikuti juga meningkatnya kesempatan kerja di Jawa Timur. Di mana angkatan kerja (sumber daya manusia) bisa menjadi peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan produktivitas maupun kemajuan perekonomian suatu wilayah.

#### **B. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Upah adalah bentuk imbalan jasa yang diperoleh oleh karyawan dari suatu perusahaan atau organisasi atas apa yang dia kerjakan, di mana jumlah upah tersebut telah disepakati kedua belah pihak. Upah digolongkan menjadi 2 yaitu upah minimum (jumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang). Upah minimum inilah yang biasa digunakan sebagai patokan minimal pengusaha dalam menentukan upah pada para pekerjanya. Sementara, upah minimum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja ialah upah terkecil yang dibayar tiap bulannya, termasuk tunjangannya yang diterima secara konsisten dan teratur , serta dihubungkan dengan presensi maupun prestasi yang didapat oleh pekerja tersebut<sup>169</sup>.

Berdasarkan hasil analisis secara parsial, variabel upah minimum kabupaten/kota ini dapat diketahui memberikan pengaruh yang signifikan

---

<sup>169</sup>Ahmad Ulil Albab Al Umar dkk, *Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran.....*hal.1-12

terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2013-2019. Dari hasil di atas diperoleh koefisien UMK menunjukkan tanda positif. Maka, setiap kenaikan upah minimum kerja akan berpengaruh meningkatkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Rofik, dkk dengan judul pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pengangguran di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota Kalimantan Barat memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengangguran terbuka Kalimantan Barat dalam periode tahun 2011-2015<sup>170</sup>. Hasil jurnal penelitian yang dilakukan oleh Joko Susilo dan Muhammad Arsyah Wildan Pratama yang menguji determinasi tingkat pengangguran terbuka di DI Yogyakarta tahun 2010-2018, yang juga menyatakan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan dan ke arah positif terhadap pengangguran terbuka DI Yogyakarta tahun 2010-2018<sup>171</sup>. Demikian pula, variabel upah minimum kabupaten/kota juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Eks-Karesidanan Surakarta tahun 1999-2013 dalam jurnal penelitian Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo<sup>172</sup>.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh

---

<sup>170</sup> Mochamad Rofik, Novi Puji Lestari dan Rizkia Septianda, *Pertumbuhan Ekonomi*,..., hal.45-52

<sup>171</sup> Joko Susanto dan Muhammad Arsyah Wildan Pratama, *Determinan Tingkat Pengangguran*.... hal.1-17

<sup>172</sup> Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo, *Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15 Nomor 1 April 2016, hal 48-54

A.W Philips dalam kurva philips tentang hubungan berbanding terbalik antara inflasi dan tingkat upah pada jumlah pengangguran dalam jangka pendek. Justru, penelitian ini selaras dengan pernyataan Kaufman dan Hotckiss dan dengan dalam Alghofari yang menjabarkan bahwa penetapan upah minimum dapat mengurangi jumlah orang berkerja, sehingga dapat memberikan efek menambah tingkat pengangguran.

Dengan demikian, Teori Philips tidak berjalan dalam situasi kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur , karena penetapan upah minimum disini bersifat kaku (*wage rigid*). Kekakuan tersebut disebabkan oleh pemerintah setempat dalam menentukan tingkat upah tidak sesuai dengan kondisi pasar dan terdapat kekuatan dari serikat kerja yang menginginkan peningkatan kesejahteraan mereka dengan adanya *demand* peningkatan upah minimum. Tidak hanya itu, pemerintah Jawa Timur juga memiliki perhitungan sendiri yang berbeda dengan provinsi lain dalam menentukan tingkat upah minimum, namun tetap dipastikan berada di atas standar kehidupan layak provinsi Jawa Timur<sup>173</sup>.

Dari sisi pengusaha, upah minimum yang tinggi berdampak pada penurunan permintaan jumlah tenaga kerja, sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran terbuka pula . Selain itu juga ketika upah semakin tinggi, akan menimbulkan iklim usaha kurang baik, karena biaya produksi perusahaan akan membengkak. Apalagi harga output tidak bisa dinaikkan, karena sengitnya persaingan usaha antar perusahaan. Sehingga, perusahaan

---

<sup>173</sup> Trianggono Budi Hartono dan Siti Umajah Masjkuri, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk.....*hal. 21-30

akan memilih strategi lain untuk menekan biaya produksi akibat kenaikan upah minimum tersebut, yaitu dengan mengurangi jumlah pekerja dan menggantinya dengan mesin. Perusahaan memilih untuk memakai cara teknik produksi padat modal melalui penggunaan teknologi, guna meningkatkan efisiensi kegiatan produksi<sup>174</sup>.

Dari sisi pekerja, tingkat upah minimum yang meningkat menyebabkan pekerja tersebut berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan yang memiliki upah tinggi. Kemudian, pekerja tersebut akan memilih meninggalkan pekerjaan lamanya, demi pekerjaan barunya yang belum tentu dia dapatkan. Sembari menunggu mendapatkan pekerjaan baru tersebutlah, pekerja menjadi pengangguran. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ketika upah minimum meningkat, tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019 juga akan mengalami kenaikan.

### **C. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Salah satu yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat suatu negara ialah pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat sejauh mana negara tersebut mengalami perkembangan dari aktivitas perekonomian dari masa ke masa. Dalam suatu wilayah, kegiatan ekonomi dapat dihitung menggunakan pendapatan regional atau produk domestik regional bruto (PDRB). Semakin besar PDRB suatu wilayah, maka makin

---

<sup>174</sup> Mochamad Rofik, Novi Puji Lestari dan Rizkia Septianda, *Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Di Kalimantan Barat*, Jurnal Inovasi Ekonomi Vol.03 No.02 September 2018 P-ISSN : 2477- 4804, hal.45-52

tingkat produktifitas masyarakat wilayah tersebut tergolong tinggi.

Berdasarkan dari hasil analisis uji t, secara parsial variabel PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2013-2019. Dari hasil di atas diperoleh skor koefisien PDRB yang menunjukkan tanda negatif. Sehingga, terjadi hubungan terbalik, setiap kenaikan PDRB akan berpengaruh menurunkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Jurnal penelitian Putri Romadhoni dkk yaitu yang mempunyai kesimpulan bahwa variabel PDRB harga konstan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta. Hal ini menandakan, apabila PDRB mengalami kenaikan, maka tingkat pengangguran terbuka yang ada akan menurun<sup>175</sup>. Dalam jurnal penelitian lain yang dilakukan oleh M. Arizal dan Marwan menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat<sup>176</sup>. Demikian halnya, jurnal penelitian Tengko Sarimuda Rb Soekarnoto yang hasilnya menyebutkan bahwa variabel PDRB mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011 secara signifikan dan negatif.

George Mankiw juga berpendapat terkait dengan hubungan antara perkembangan PDRB yang mempunyai pengaruh kuat terhadap tingkat

---

<sup>175</sup> Putri Romadhoni, Dita Zamrotul Faizah, Nadia Afifah, *Pengaruh Produk Domestik.....*hal. 115-121

<sup>176</sup> M.Arizal dan Arwan, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto.....* hal. 433- 442

pengangguran. Pendapat ini dilandasi pada Hukum Okun yang menemukan hasil bahwa ada korelasi negatif antara PDRB/GDP terhadap tingkat pengangguran. Yang berarti bahwa ketika PDRB mengalami kenaikan, maka tingkat pengangguran menurun. Hal ini dikarenakan, PDRB berkaitan erat dengan tingkat produktifitas suatu wilayah. Di mana PDRB menurun, berarti output yang dihasilkan sedikit, maka konsumsi masyarakat wilayah berkurang, serupa dengan tenaga kerja yang digunakan turun. Sehingga mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan begitu juga sebaliknya<sup>177</sup>

Berdasarkan beberapa jurnal penelitian tersebut dan hukum okun, hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian mereka, namun hanya berbeda di letak signifikasinya. Karena dalam penelitian ini, variabel PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019. Ketidaksignifikan pengaruh PDRB terhadap pengangguran terbuka Jawa Timur mungkin disebabkan terkonsentrasinya kekayaan (terjadi ketimpangan antara kabupaten/kota satu dengan yang lainnya di Jawa Timur) dan biasanya dampak pertumbuhan ekonomi baru dirasakan dalam jangka panjang. Sementara struktur perekonomian Jawa Timur seringkali didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yang meliputi lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pada sektor industri yang selalu memberikan kontribusi tertinggi diantara

---

<sup>177</sup> M.Arizal dan Arwan, *Pengaruh Produk Domestik Regional.....* hal. 433- 442



3 lapangan usaha tersebut, di tahun 2019 misalnya kontribusinya mencapai 30,24 % . Angka tersebut disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 18,46%. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya memberikan kontribusi sebesar 11,43%<sup>178</sup>. Inilah yang menjadi permasalahan, kegiatan perekonomian industri pengolahan yang menyumbang kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi lebih terpusat pada kota-kota besar antara lain Kota Surabaya, Lamongan, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan lain-lain. Sementara, sektor pertanian yang seharusnya memiliki kontribusi yang besar di mana Jawa Timur adalah lumbung sektor pertanian beberapa komoditas malah memiliki kontribusi yang minim bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur , sama halnya dalam penyerapan tenaga kerjanya.

Perbedaan besaran PDRB juga terlihat jelas menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi. Bisa dikatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin memberikan dampak pengangguran yang kurang , karena tidak disertai dengan pemerataan ekonomi dan bisa dibilang belum maksimalnya pemerintah dalam mengembangkan berbagai sektor perekonomian dan memanfaatkan potensi yang ada. Sehingga, yang merasakan dampak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi hanya segelintir wilayah saja.

---

<sup>178</sup> Kominfo Jatim Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur, “Selama 2019, Ekonomi Jatim Tumbuh 5,52% dalam <https://kominfo.jatimprov.go.id> , diakses 4 Mei 2021

#### **D. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur kemajuan yang telah dilakukan oleh suatu daerah. Kemajuan mengartikan bahwa program pembangunan membawa perubahan atas kehidupan manusia, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Indeks pembangunan manusia mencakup 3 dimensi untuk menghitungnya meliputi angka Angka harapan hidup yang digunakan untuk mengukur umur panjang (*longevity*) dan hidup sehat, angka harapan sekolah dan angka rata lama-lama sekolah digunakan untuk mengukur pengetahuan dan Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita yang digunakan untuk mengukur standar hidup layak

Berdasarkan hasil analisis parsial, terlihat bahwa variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka periode tahun 2013-2019. Dari hasil di atas diperoleh skor koefisien IPM menunjukkan tanda negatif, sehingga setiap kenaikan IPM berpengaruh menurunkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Dalam hasil jurnal penelitian Riska Garnella dkk menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini, yaitu variabel indeks pembangunan manusia mempengaruhi secara signifikan pengangguran terbuka Provinsi Aceh ke arah negati (berbanding terbalik hubungannya)<sup>179</sup>. Sementara sedikit berbeda dengan hasil jurnal penelitian oleh Muhammad Nurcholis variabel indeks

---

<sup>179</sup> Riska Garnella, Nazaruddin A.Wahid, Yulindawati Yulindawati, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh*, JIMEBIS Volume 1 Nomor 1 Januari – Juni 2020, hal.21-35

pembangunan manusia memang berpengaruh signifikan, tetapi hubungannya dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2014 adalah positif. Yang berarti, ketika indeks pembangunan manusia mengalami penurunan, maka tingkat pengangguran juga ikut turun dan demikian sebaliknya.<sup>180</sup>

Meskipun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah dalam jurnalnya memperoleh hasil bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap tingkat pengangguran. Apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan menurun<sup>181</sup>.

Berdasarkan penjelasan Todaro, tujuan dari pembangunan manusia adalah manusia itu sendiri. Proses pembangunan manusia ini diharapkan menjadi upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, jadi sumber daya manusia tidak hanya menang dalam jumlahnya, melainkan juga kemampuannya dalam menyerap teknologi modern, guna mengembangkan *skill* dan kemahirannya untuk menciptakan kesempatan kerja. Yang nantinya dapat mengurangi jumlah pengangguran dan akhirnya tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari angka IPM nya akan dapat menurunkan tingkat pengangguran di suatu daerah termasuk di Provinsi Jawa

---

<sup>180</sup> Muhammad Nurcholih, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi* .....hal. 46-57

<sup>181</sup> Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia* .....hal.51-72

Timur<sup>182</sup>. Maka, dapat disimpulkan bahwa ketika IPM naik, tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019 akan berkurang dan menggambarkan pula adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari tiga dimensi dari indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.

#### **E. Pengaruh Angkatan Kerja, Upah Minimum, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan uji simultan (F) diatas dapat diketahui bahwa variabel angkatan kerja, UMK, IPM dan PDRB secara simultan (secara bersama-sama) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka periode tahun 2013-2019. Atau bisa dikatakan bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan di antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang berarti bahwa, ketika terjadi peningkatan secara bersama-sama variabel angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, PDRB (produk domestik regional bruto), dan indeks pembangunan manusia (IPM), maka tingkat pengangguran terbuka juga akan meningkat. Begitupun, sebaliknya ketika terjadi penurunan variabel angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, PDRB (produk domestik regional bruto), dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara bersama-sama, maka tingkat pengangguran terbuka juga akan ikut menurun.

---

<sup>182</sup> Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia.....* hal.51-72

Ditambah pula, dalam penelitian ini menemukan hasil bahwasannya besar angka pengaruh dari variabel yang diteliti diantaranya variabel angkatan kerja, upah minimim kabupaten/kota, PDRB (produk domestik regional bruto), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019 .